

KONSEP KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN DALAM MENGEMBANGKAN PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

H. A. Marjuni

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

***ABSTRACT:** Leadership is the process of inspiring others to work hard to achieve important work. Leadership builds commitment and enthusiasm for people to carry out their talents to help achieve plans, supervision so that things go well. In its activities, the leader has the power to mobilize and influence his subordinates in relation to the tasks that must be carried out. At the assignment stage, the leader must provide clear direction and guidance, so that subordinates can carry out their duties easily and the results are achieved in accordance with the objectives that have been set. Conceptually, the term empowerment has the basic word "power" which means ability, strength, ability to do business. Empowerment in education can be interpreted as a process of making human resources capable or strong in carrying out an effort in a certain field in the field of education. The goal of community empowerment is to help people gain the power to make decisions and determine the actions they will take related to themselves, including reducing the effects of personal and social barriers to action.*

***Keywords:** Leadership, Education, Empowerment, Community and Users*

I. PENDAHULUAN

Pemimpin dalam Pendidikan merupakan roda penggerak sebuah lembaga atau organisasi. Kualitas kepemimpinan menentukan arah keberhasilan lembaga atau organisasinya. Sehingga seorang pemimpin harus mampu mengantisipasi, mengelola dan menggerakkan roda organisasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika seorang pemimpin (*leader*) bukan sekedar pengambil keputusan (*decision making*) tapi sebagai kunci keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi.¹

Pemimpin Pendidikan merupakan keterampilan seseorang dalam memanfaatkan kekuasaannya untuk memengaruhi orang lain agar melaksanakan aktivitas tertentu yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan. Memimpin adalah mengerjakan niat demi tujuan tertentu, tetapi yang dilaksanakan oleh orang lain. Orang yang dipimpin adalah orang yang diperintah, dipengaruhi dan diatur oleh ketentuan yang berlaku secara formal ataupun nonformal.²

Kepemimpinan yang memberdayakan mengimplikasikan suatu keinginan untuk melimpahkan tanggung jawab dan berusaha membantu dalam menentukan kondisi

¹Imam Machali, *Kepemimpinan Pendidikan dan Pembangunan Karakter*, (Yogyakarta: Pedagogia, 2015), h. 4.

²Sermal, "Kepemimpinan Pendidikan untuk Mengembangkan Sekolah Bermutu", *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 22 No. 2, 2015, h. 245.

dimana orang lain dapat berhasil. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus menjelaskan apa yang diharapkannya, harus menghargai kontribusi setiap orang, harus membawa lebih banyak orang keluar “kotak organisasi” dan harus mendorong setiap orang untuk berani mengemukakan pendapat.³

Kepemimpinan dalam Pendidikan mempunyai peranan yang menentukan sebagai satu kekuatan dalam menggerakkan sumber daya sekolah untuk bekerjasama dengan masyarakat, serta untuk memperoleh berbagai dukungan sumber daya manusia, dana, serta dukungan informasi berbagai lembaga dan dukungan politis dari segenap jajaran aparat pendidikan.

II. KAJIAN TEORI

A. Hakikat Kepemimpinan Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

Istilah kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama diantara pemimpin dan anggotanya. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan anggota dan juga dapat memberikan pengaruh, dengan kata lain para pemimpin tidak hanya dapat memerintah bawahan apa yang harus dilakukan, tetapi juga dapat mempengaruhi bagaimana bawahan melaksanakan perintahnya. Sehingga terjalin suatu hubungan sosial yang saling berinteraksi antara pemimpin dengan bawahan, yang akhirnya terjadi suatu hubungan timbal balik. Oleh sebab itu bahwa pemimpin diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan kepemimpinannya, karena apabila tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, maka tujuan yang ingin dicapai tidak akan dapat tercapai secara maksimal.

Seorang pemimpin pendidikan, di dalam Islam disebut Khalifah, dan khalifah adalah orang yang diserahi amanat dan tanggung jawab sebagai pemimpin oleh Allah swt. Sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

Terjemahannya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-Baqarah (2) : 30).

Dalam ayat itu difirmankan oleh Allah swt. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka

³Hasan Basri, *Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2014), h. 132.

bumi.” Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa Allah akan menjadikan Khlaifah (pemimpin) diantara ummat manusia. Allah akan memilih ummatnya yang akan diberikan amanat untuk menjadi pemimpin dalam berbagai hal, atau berbagai lingkungan.⁴

Kepala sekolah adalah bagian dari contoh kepemimpinan itu, berarti ia adalah seorang khalifah yang telah diberikan amanat oleh Allah untuk menjadi pemimpin di lembaga pendidikan. Kepemimpinan tersebut harus dijaga dan dipertanggung jawabkan oleh seseorang yang telah diberikan amanat sebagai kepala sekolah tersebut.

Kepemimpinan pendidikan yang diperlukan saat ini adalah kepemimpinan yang didasarkan pada jati diri bangsa yang hakiki yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan agama, serta mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia pendidikan khususnya dan umumnya atas kemajuan-kemajuan yang diraih diluar sistem sekolah.⁵

Secara konseptual, istilah pemberdayaan memiliki kata dasar “daya” yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya kemampuan untuk melakukan usaha. Pemberdayaan dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai suatu proses menjadikan sumber daya manusia mampu atau kuat dalam melakukan suatu usaha pada suatu bidang tertentu dalam bidang pendidikan atau dapat juga diartikan sebagai pengguna kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam melangsungkan eksistensi satuan pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁶

Islam memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang individunya saling membutuhkan dan saling mendukung. Antar individu masyarakat mempunyai hubungan yang idealnya saling menguntungkan. Kesenjangan dalam hal pendapatan ekonomi merupakan sebuah potensi yang dapat dimanfaatkan guna memupuk kerukunan dan silaturahmi antar sesama. Islam mendorong pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dengan berpegang pada 3 prinsip utama; ketiga prinsip itu adalah prinsip *ukhuwwah*, prinsip *ta'awun* dan prinsip persamaan derajat.⁷

Pertama, prinsip *ukhuwwah*. *Ukhuwwah* dalam bahasa arab berarti persaudaraan. Prinsip ini menegaskan bahwa tiap-tiap muslim saling bersaudara, walaupun tidak ada pertalian darah antara mereka. Rasa persaudaraan menjamin adanya rasa empati dan merekatkan silaturahmi dalam masyarakat.

⁴Ali Muhammad Taufiq, *Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyieal-Kattani & Sabaruddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2014), h. 65.

⁵Aan Komariah, *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 80.

⁶Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 49.

⁷Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39 No. 1, 2019, h. 35.

Dalam konteks pemberdayaan, ukhuwwah merupakan motif yang mendasari seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Rasulullah memiliki visi masyarakat muslim yang saling menolong dan saling menanggung kesulitan secara bersama. Islam mendorong pemeluknya untuk meringankan beban saudaranya yang dilanda kesulitan melalui sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang melapangkan kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat.” Islam merupakan agama yang menanamkan kepedulian dalam diri pemeluknya.⁸

Kedua, prinsip ta’awun. Allah SWT mendorong manusia untuk saling tolong-menolong sesamanya. Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta’awun atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal.⁹

Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait.

Ketiga, prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memproklamkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, ayat ini merupakan dorongan bagi semua pihak untuk terus bersama memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk membantu masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan yang terkait dengan diri mereka sendiri, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹⁰

Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat mencakup keterlibatan mental dan emosional yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan program pendidikan di sekolah dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Ciri keterlibatan seseorang atau kelompok dalam mengikuti suatu kegiatan adalah kemampuan untuk mengikuti suatu kegiatan dan dapat menikmati hasilnya.¹¹

⁸Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”, h. 35.

⁹Ulfi Putra Sany, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”, h. 35.

¹⁰Sugeng Suryanto, “Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah (Studi Evaluasi Kebijakan pada Program Bos) di Kabupaten Pacitan”, Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, 2013, h. 268.

¹¹Siti Fatimah Kadir, “Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Al-Ta’dib, Vol. 6 No. 1, 2013, h. 172.

Etika dari pemimpin yang memberdayakan adalah menghormati orang dan menghargai kekuatan dan kontribusi mereka yang berbeda-beda, menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, jujur, bertanggung jawab untuk bekerjasama dengan yang lain, mengakui nilai pertumbuhan dan perkembangan pribadi, mementingkan kepuasan pelanggan, berusaha memenuhi kebutuhan akan adanya perbaikan sebagai suatu proses yang tetap dimana setiap orang harus ikut ambil bagian secara aktif.

Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana yang sangat penting dan berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangaat erat dalam mencapai tujuan sekolah yang efektif dan efisien. Sekolah juga harus menunjang pencapaian tujuan atau pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu sekolah berkewajiban untuk memberi pemahaman tentang tujuan, program-program, kebutuhan, serta keadaan masyarakat. Selain itu, sekolah juga harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan dan keinginan serta tuntutan masyarakat terhadap sekolah.¹²

Menurut Sutisna ada beberapa maksud hubungan antara kepala sekolah dengan masyarakat yang diantaranya adalah:

1. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan saran-saran dari sekolah.
2. Untuk menilai program sekolah.
3. Untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik.
4. Untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan.
5. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.
6. Untuk memberitahu masyarakat tentang pekerjaan sekolah.
7. Untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dan peningkatan program sekolah.¹³

Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaat dan artinya bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, material dan pemanfaatan masyarakat sebagai sumber belajar. Selanjutnya bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam pendidikan, melakukan tekanan dan tuntutan terhadap sekolah. Berbagai teknik dan media dapat dilakukan dalam kontek ini seperti mengadakan rapat atau pertemuan, surat menyurat, buku penghubung, buletin sekolah dan kegiatan ekstra kurikuler yang bermanfaat bagi peserta didik maupun orang tua.

¹²Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, h. 164.

¹³Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, h. 166.

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar sekolah, kepala sekolah dan guru merupakan kunci keberhasilan, yang harus menaruh perhatian terhadap apa yang terjadi pada peserta didik di sekolah dan apa yang dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah. Kepala sekolah dituntut untuk berusaha membina dan mengembangkan kerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis ini akan membentuk:¹⁴

1. Saling pengertian antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk di dunia kerja.
2. Saling membantu antara sekolah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan peranan masing-masing.
3. Kerjasama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang ada di masyarakat dan mereka merasa bangga dan ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di sekolah.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat dan lingkungan sekolah diharapkan tercapainya hubungan antara sekolah dengan masyarakat yang baik dan harmonis, meningkatnya kinerja sekolah dan terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara produktif, efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan lulusan yang produktif dan berkualitas.

B. Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Jika ditinjau dari kepentingan sekolah, pengembangan penyelenggaraan hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk:

1. Memelihara kelangsungan hidup sekolah.
2. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
3. Memperlancar proses belajar mengajar.
4. Memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pengembangan dan pelaksanaan program sekolah.

Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, maka tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu:¹⁵

1. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang mental spiritual.
2. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
3. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
4. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya.

¹⁴Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, h. 166.

¹⁵Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 189.

Secara lebih kongkrit lagi tujuan diselenggarakannya hubungan sekolah dan masyarakat adalah:¹⁶

1. Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat.
2. Mendapatkan dukungan dan bantuan moril atau pun materil yang diperlukan bagi pengembangan sekolah.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah.
4. Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Adapun bentuk partisipasi masyarakat, meliputi:¹⁷

1. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Dana

Pengelola program pendidikan disekolah-sekolah membutuhkan topangan dana yang tidak sedikit dan hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi mutu program dan hasil pendidikan”. Masyarakat menyumbangkan dana dalam rangka pembangunan sebuah lembaga pendidikan sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk dana ini membuat para pemimpin cenderung mengambil kebijakan untuk tidak membatasi, agar penduduk yang ekonomisnya pas-pasan tidak merasa keberatan jika dimintai sumbangan. Partisipasi masyarakat dalam pengadaan dana sangat penting demi kelangsungan pendidikan.

2. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Tenaga

Disamping menyumbangkan dana, masyarakat juga menyumbangkan tenaganya. Biasanya masyarakat yang menyumbangkan tenaga adalah para warga yang minim ekonominya, maka alternatif lain yang dapat diberikan adalah tenaga yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Barang atau Sarana Prasarana

Disamping menyumbangkan dana dan tenaga, masyarakat juga dapat menyumbangkan dalam bentuk barang. Dalam hal ini masyarakat dapat menyediakan perlengkapan belajar yang dibutuhkan untuk belajar dilembaga pendidikan dan membantu fasilitas-fasilitas belajar yang dibutuhkan lembaga dalam memajukan proses belajar mengajar. Adapun sumbangan yang diberikan data berupa bahan bangunan, alat bangunan, dan sarana prasarana pendidikan.

4. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Pikiran

Usaha masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak berarti bahwa rakyat memiliki beban dan tanggung jawab pelaksanaan saja, tetapi juga menerima kembali dan memanfaatkan hasil-hasil pelaksanaan tersebut. Hal ini

¹⁶Daryanto, *Administrasi dan Manajemen Sekolah*, h. 190.

¹⁷Bambang Prasetyo, dkk, *Sosiologi Pendidikan*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), h. 45.

disebutkan karena usaha masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu menyangkut dua aspek yaitu aspek hak dan aspek kewajiban.

Sebagai hak, karena pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai peluang untuk memanfaatkan kesempatan tersebut yang timbul pada proses pendidikan. Di samping untuk menikmati hasil pendidikan juga sebagai kewajiban, karena pada dasarnya semua warga masyarakat wajib ikut serta memikul beban pendidikan dan mensukseskan jalannya pendidikan yang dalam hal ini berapa tanggung jawab bersama terhadap lembaga pendidikan yang perlu dipelihara, dipertahankan dan dimajukan.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Bentuk Guru

Masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pemilihan guru yang dianggap mampu mendidik anak-anak mereka menjadi generasi muslim yang berkualitas yang sesuai dengan tuntutan zaman.

III. SIMPULAN

Kepemimpinan adalah proses memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bekerja keras mencapai pekerjaan yang penting, sedangkan istilah pemberdayaan secara konseptual memiliki kata dasar “daya” yang berarti kemampuan, kekuatan, upaya kemampuan untuk melakukan usaha.

Tujuan hubungan sekolah dan masyarakat: 1) Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat, 2) Mendapatkan dukungan dan bantuan bagi pengembangan sekolah, 3) Memberikan informasi kepada masyarakat program sekolah, 4) Memperkaya atau memperluas program sekolah, dan 5) Mengembangkan kerja sama yang lebih erat dalam mendidik anak. Partisipasi masyarakat sangat diperluakan dalam pencapaian tujuan sekolah, diaman masyarakat menjadi *partner* sekolah dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, khususnya dalam membentuk pribadi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Hasan. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Pustaka Setia. 2014.
- Daryanto. *Administrasi dan Manajemen Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Kadir, Siti Fatimah. “Meningkatkan Mutu Pendidikan Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal Al-Ta’dib*. Vol. 6 No. 1. 2013.
- Komariah, Aan. *Manajemen Supervisi dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Machali, Imam. *Kepemimpinan Pendidikan dan Pembangunan Karakter*. Yogyakarta: Pedagogia. 2015.

- Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014.
- Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2013.
- Nata, Abuddin. Kapita Selekta Pendidikan Islam. Bandung: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Pidarta, Made. Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem. Jakarta: Rineka Cipta. 2015.
- Prasetyo, Bambang, dkk. Sosiologi Pendidikan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2017.
- Sany, Ulfi Putra. “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an”. Jurnal Ilmu Dakwah. Vol. 39 No. 1. 2019.
- Sermal, “Kepemimpinan Pendidikan untuk Mengembangkan Sekolah Bermutu”. Jurnal Tarbiyah. Vol. 22 No. 2. 2015.
- Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.
- Suryanto, Sugeng. “Pemberdayaan Sekolah dan Komite Sekolah (Studi Evaluasi Kebijakan pada Program Bos) di Kabupaten Pacitan”. Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan. 2013.
- Taufiq, Ali Muhammad. Praktik Manajemen Berbasis Al-Qur’an. terj. Abdul Hayyieal-Kattani & Sabaruddin. Jakarta: Gema Insani Press. 2014.